

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara ataupun suatu daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Pengembangan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan makna tersendiri pada usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi serta dalam usaha menekan angka kemiskinan suatu negara. Saat ini UMKM di Indonesia berkontribusi pada PDB Indonesia dengan jumlah nominal Rp 9.062 triliun pada tahun 2018 dan 9.580 triliun pada tahun 2019 merupakan pencapaian yang besar dalam pertumbuhan UMKM. Jumlah tersebut berasal 119.562.843 juta atau 96,9 % tenaga kerja yang ada di Indonesia¹.

Di banyak negara, UKM memberikan kontribusi yang sama besarnya seperti yang terdapat di Indonesia. Tercatat jumlah UKM di Malaysia rata-rata mencapai 90% dari total seluruh unit usaha, dan menyerap 2/3 tenaga kerja dari jumlah pengangguran yang ada (Norashikin dan Nadia, 2017). Sementara itu di Negara Turki, UKM juga menjadi penggerak perkenomian negara tersebut, namun sampai saat ini para UKM terkendala oleh praktik pengelolaan keuangan yang tergolong rendah, hal tersebut yang menjadi penyebab tidak adanya investor yang memberikan modal karena tidak adanya laporan keuangan yang jelas, karena

¹ <https://kemenkopukm.go.id/>

perolehan dana merupakan masalah penting bagi banyak UKM, yang dapat juga menyebabkan kegagalan bisnis (Hande Karadag, 2016).

Suatu usaha besar maupun usaha kecil tidak akan terlepas dari masalah permodalan. Terlebih lagi pada sektor UMKM di Indonesia masih terkendala permasalahan modal untuk mengembangkan usaha dan juga masalah pembukuan akuntansi atau pengelolaan keuangan UMKM, dengan demikian perlunya bagi UMKM untuk diberikan pelatihan dan tindak lanjut mengenai permodalan dan pemasaran. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Depok terjadi penurunan peningkatan volume usaha, yakni di tahun 2020 tercapai 34,67% sedangkan di tahun 2019 mencapai 44,00 % yang disebabkan oleh pandemi covid 19 serta kurangnya akses permodalan usaha², tidak adanya pembukuan yang jelas mengakibatkan umkm kesulitan mendapatkan akses layanan keuangan, ataupun untuk mendatangkan investor. Kualitas Laporan yang baik akan memudahkan pelaku UMKM untuk meningkatkan sumber dana melalui pinjaman kredit, ataupun dapat mendatangkan investor (Marcellia, 2020).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam kedudukannya sebagai organisasi sekaligus sebagai badan penyusun standar akuntansi keuangan melalui dewan standar akuntansi keuangan IAI menyusun peraturan untuk membantu UMKM peraturan tersebut adalah SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). SAK ETAP ini peraturan mengenai pengakuan biaya berdasarkan historis, mengatur transaksi yang umum ada di dalam transaksi UMKM, bentuk pengaturan lebih sederhana dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dan relatif

² <https://dkum.depok.go.id/>

tidak berubah dalam tahun sebagai cara untuk memperjelas bahwa tidak semua entitas bisnis melaksanakan akuntabilitas publik maka pada tanggal 17 Juli 2009

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) membentuk Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk membantu proses penyelenggaraan akuntansi secara lebih sederhana. SAK ETAP digunakan pada entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan seperti UMKM dan Koperasi. Penerapan SAK ETAP mulai berlaku per 1 Januari 2011 sebagai acuan akuntansi koperasi dan UMKM dalam menerapkan bentuk, isi penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan. Penetapan pedoman baru ini didukung dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor : 04/Per/M.KUKM/VII/2021 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi.

SAK ETAP tergolong masih baru, mayoritas pelaku UMKM belum mampu menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan dikarenakan kurang pemahamannya standar akuntansi yang digunakan. Banyak dari pegawai yang bekerja dibagian akuntansi masih beranggapan bahwa menyusun laporan keuangan dengan pedoman SAK ETAP menjadi kurang baik. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap implementasi SAK ETAP yaitu pendidikan yang masih rendah, berlatar belakang pendidikan non akuntansi, masa tugas pekerjaan saat bekerja masih kurang lama dan kurangnya pemberian informasi dan sosialisasi yang diberikan dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM. Apabila SAK ETAP ini telah berlaku efektif, maka perusahaan kecil seperti UMKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK Umum yang berlaku. Dalam SAK ETAP memberikan banyak kemudahan bagi UMKM dibandingkan dengan PSAK dengan

ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Penggunaan SAK ETAP ditujukan untuk entitas tanpa akuntansi.

Penelitian sebelumnya Karadag (2016) menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja laporan keuangan perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya. Namun hal tersebut tidak didukung oleh penelitian S. Hanifa et. al (2020) menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menggambarkan bahwa tidak semua pelaku UMKM di Kecamatan Kalideres memiliki tingkat pendidikan yang tinggi serta mendapatkan ilmu pengetahuan akuntansi di pendidikan formal.

Pemahaman akuntansi juga menjadi kendala dalam pelaporan keuangan berdasarkan sak etap hal ini dinyatakan oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi pemilik dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan usaha kecil dan menengah (Jafari, 2019). Namun hal tersebut tidak didukung oleh penelitian S. Hanifah et. Al (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

Dalam hal pelatihan penyusunan laporan keuangan juga memberikan dampak yang baik untuk pelaporan keuangan berdasarkan sak etap, hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pelatihan penyusunan laporan

keuangan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan berdasarkan sak etap (Hanifah, 2020). Namun hal tersebut tidak didukung oleh penelitian Marsella dan Suttipun (2018) menyatakan bahwa ada atau tidaknya pelatihan penyusunan laporan keuangan yang diberikan oleh pemerintah tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, karena setiap UMKM akan terus berlatih dan belajar dari manapun untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kemajuan usahanya.

Dengan permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK ETAP (Studi Kasus pada UMKM Kota Depok)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan, dengan membuat pelaporan menurut versi masing-masing, menyebabkan pelaku UMKM kesulitan dalam meminjam modal atau mengundang investor untuk berinvestasi pada UMKM tersebut.
2. Tingkat pendidikan SDM pada UMKM yang mayoritas adalah SMA/SMK/MA/ yang sederajat, menjadi salah satu kendala dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.

3. Keterbatasan pemahaman akuntansi SDM di UMKM menjadi salah satu faktor dalam menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.
4. Tidak banyaknya pelatihan penyusunan laporan keuangan untuk SDM pada UMKM menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan UMKM yang sesuai dengan standar akuntansi.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, serta keterbatasan waktu, biaya dan materi dalam melakukan penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada variabel yang diteliti yaitu, tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, pelatihan penyusunan laporan keuangan, pelaporan keuangan umkm berdasarkan sak etap. Penelitian dilakukan di Kota Depok Jawa Barat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Pelaporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK ETAP?
2. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap Pelaporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK ETAP?
3. Apakah pelatihan penyusunan laporan keuangan berpengaruh terhadap Pelaporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK ETAP?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah variabel tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP.
2. Untuk mengetahui apakah variabel pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP.
3. Untuk mengetahui apakah variabel pelatihan penyusunan laporan keuangan UMKM berpengaruh terhadap pentingnya pembukuan atau pelaporan keuangan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Pembina UMKM

Penelitian ini diharapkan memberikan saran kepada Lembaga Pembina UMKM terkait untuk pelatihan atau sosialisasi yang intensif dapat membantu pengusaha UMKM memahami proses pelaporan keuangan sesuai SAK ETAP.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tambahan bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian terkait UMKM dan SAK ETAP.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dalam menambahkan pengetahuan dan memberikan motivasi mengenai pelaporan keuangan SAK ETAP UMKM.

Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, dan pelatihan penyusunan laporan keuangan terhadap pelaporan keuangan berdasarkan sak etap.